

Periodisasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam

Anis Fauzi¹, Rijal Firdaos², Reni Suwenti³, Een Masdariah⁴, Eti Kurniawati⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

¹anis.fauzi@uinbanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji periodisasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era digital kontemporer. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis dinamika perkembangan kurikulum PAI yang mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kurikulum PAI telah bertransformasi dari pendekatan normatif-doktriner menjadi lebih kontekstual, integratif, dan berorientasi pada kompetensi. Dimulai dari perjuangan pengakuan pada masa awal kemerdekaan, penguatan posisi pada era Orde Lama dan Orde Baru, hingga diversifikasi dan personalisasi pembelajaran di era Reformasi dan digitalisasi. Tantangan utama dalam implementasi kurikulum PAI meliputi kesenjangan literasi digital, pengaruh konten negatif, dan kesiapan tenaga pendidik dalam mengadaptasi teknologi pembelajaran. Sementara itu, integrasi teknologi membuka peluang pengembangan pembelajaran PAI yang lebih interaktif dan personalisasi. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman komprehensif tentang evolusi kebijakan kurikulum PAI dan menawarkan kerangka konseptual untuk pengembangan pendidikan agama yang adaptif dengan tuntutan zaman sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang esensial.

Kata Kunci: Periodisasi Kebijakan, Kebijakan Pendidikan, Kebijakan Kurikulum, Pendidikan Agama Islam.

Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan akhlak peserta didik (Judrah, Arjum, Haeruddin, & Mustabsyirah, 2024). Sejak Indonesia merdeka, kebijakan kurikulum PAI terus mengalami perubahan dan perkembangan yang disesuaikan dengan dinamika sosial, politik, dan budaya bangsa. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam menjadikan pendidikan agama sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah seperangkat rencana, program, dan pedoman pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membentuk pemahaman, sikap, dan praktik keagamaan peserta didik sesuai dengan ajaran Islam (Irawan, 2024). Kurikulum ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang nilai-nilai keislaman, termasuk aspek akidah, ibadah, akhlak, serta sejarah dan budaya Islam (Saputro, Helta, Ambiya, Divando, & Syah, 2024). Secara umum, kurikulum PAI bertujuan untuk membina peserta didik agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, serta mampu mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari (Harahap, Kurrahman, & Rusmana, 2024). Kurikulum ini juga disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, serta kebutuhan zaman, sehingga terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sesuai dengan kebijakan pendidikan nasional. Dalam pelaksanaannya, kurikulum PAI tidak hanya berfokus pada aspek kognitif atau teori, tetapi juga menekankan aspek afektif dan psikomotorik, seperti pembentukan karakter Islami dan pengamalan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Seiring berjalannya waktu, kebijakan kurikulum PAI mengalami periodisasi yang mencerminkan berbagai pendekatan dalam pendidikan Islam. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan agama lebih menekankan pada penguatan identitas keislaman dalam sistem pendidikan nasional. Memasuki era Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah semakin menegaskan posisi pendidikan agama dalam kurikulum sekolah, dengan tujuan membangun karakter bangsa yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Era Reformasi membawa perubahan besar dalam kebijakan pendidikan, termasuk dalam kurikulum PAI. Munculnya berbagai kurikulum seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, dan Kurikulum 2013 menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan pembelajaran agama dengan perkembangan zaman. Saat ini, dengan hadirnya Kurikulum Merdeka, pendidikan agama Islam semakin diarahkan pada pendekatan yang lebih fleksibel, inovatif, dan berbasis teknologi.

Namun, perubahan kurikulum tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi dalam implementasi, kesiapan tenaga pendidik, serta relevansi materi ajar dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, memahami periodisasi kebijakan kurikulum PAI menjadi penting agar dapat mengevaluasi perkembangan serta merancang kebijakan pendidikan agama yang lebih efektif di masa depan. Maka, kajian tentang periodisasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kurikulum PAI dari masa ke masa, memahami faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kebijakan, serta merumuskan strategi pembelajaran agama Islam yang sesuai dengan tantangan era modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur, berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan artikel-artikel penelitian yang diterbitkan dalam rentang waktu 2021-2025. Sumber-sumber tersebut dipilih untuk mendapatkan data terkini mengenai perkembangan kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), di mana peneliti melakukan identifikasi, kategorisasi, dan interpretasi terhadap berbagai kebijakan kurikulum PAI berdasarkan periodisasinya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis-kronologis untuk memetakan perubahan dan perkembangan kurikulum PAI dari masa ke masa, serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif. Dalam tahap interpretasi, peneliti melakukan analisis kritis terhadap setiap periode perubahan kurikulum PAI dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi kebijakan tersebut.

Hasil

Dinamika Perkembangan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam (PAI) mengalami dinamika perkembangan yang signifikan dalam sejarah pendidikan Indonesia. Perjalanannya dapat dibagi menjadi beberapa periode penting, mulai dari masa tradisional (pesantren dan surau), masa kolonial Belanda, pasca-kemerdekaan, hingga era reformasi dan globalisasi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, globalisasi, teknologi, serta perubahan sosial dan budaya. Meskipun menghadapi tantangan seperti kesenjangan kualitas, relevansi kurikulum, radikalisme, dan adaptasi teknologi, pendidikan Islam memiliki peluang besar untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi, integrasi dengan ilmu umum, dan penguatan pendidikan karakter Islami.

Integrasi Nilai-nilai Agama dengan Teknologi dan Modernisasi

Integrasi nilai-nilai agama dengan teknologi dan modernisasi menjadi kebutuhan penting agar ajaran Islam tetap relevan tanpa kehilangan esensinya. Urgensi integrasi ini didasari oleh perubahan gaya hidup masyarakat, percepatan penyebaran informasi, tantangan globalisasi, dan peluang dakwah berbasis teknologi. Integrasi ini telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti pendidikan Islam berbasis teknologi, dakwah digital dan media sosial, praktik ibadah, bisnis dan ekonomi Islam digital, serta pengembangan AI Islami. Meskipun menghadapi tantangan seperti penyebaran konten tidak kredibel dan ketergantungan teknologi, strategi optimalisasi dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital Islami, pengembangan teknologi Islami berkualitas, dan penyeimbangan antara teknologi dengan pembelajaran konvensional.

Peran Pendidikan Agama dalam Membentuk Karakter Bangsa

Pendidikan agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa yang bermoral, beretika, dan berakhlak mulia. Urgensinya meliputi penanaman nilai-nilai moral, pembentukan kepribadian berintegritas, peningkatan kesadaran sosial, penangkalan pengaruh negatif globalisasi, dan pembentukan generasi beradab. Peran ini terwujud dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, hingga dunia kerja. Meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya implementasi nilai agama, pengaruh media asing, minimnya peran keluarga, dan kesulitan integrasi dengan teknologi, solusi dapat diterapkan melalui penguatan pendidikan agama dalam kurikulum, penguatan peran keluarga, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat.

Penguatan Metode Pembelajaran Berbasis Digital dan Karakter

Di era digital, metode pembelajaran mengalami transformasi dengan hadirnya teknologi canggih. Penguatan pembelajaran berbasis digital dan karakter diperlukan karena perubahan paradigma pendidikan, tantangan Revolusi Industri 4.0, peningkatan motivasi belajar, dan kebutuhan menanamkan nilai karakter di era digital. Strategi penguatan dapat dilakukan melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran, seperti e-learning, multimedia interaktif, AI, serta teknologi VR dan AR yang membuat pengalaman belajar lebih mendalam dan nyata. Implementasi teknologi dalam pembelajaran PAI juga mendorong terwujudnya pembelajaran yang lebih adaptif dan personalisasi, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan gaya dan kecepatannya masing-masing. Dengan pendekatan ini, guru PAI dapat mengoptimalkan perannya sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam mengeksplorasi nilai-nilai keislaman, mengintegrasikan teknologi seperti platform diskusi online, aplikasi hafalan Al-Qur'an, dan simulasi manasik haji virtual untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan kontekstual.

Penguatan Karakter dalam Pembelajaran Digital

Penguatan karakter dalam pembelajaran digital dapat dilakukan melalui penanaman etika digital, pembudayaan disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran online, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan penanaman sikap kolaboratif. Beberapa metode pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi dengan pendidikan karakter meliputi blended learning, gamifikasi, flipped classroom, project-based learning berbasis digital, dan microlearning. Dengan integrasi teknologi dan nilai karakter yang tepat, pendidikan berbasis digital dapat menjadi alat efektif untuk mencetak generasi unggul yang cerdas, kreatif, bermoral, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Keberhasilan penguatan karakter dalam pembelajaran digital juga bergantung pada kolaborasi yang sinergis antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung. Pendidik PAI perlu mengembangkan kompetensi digital mereka secara berkesinambungan agar mampu merancang pembelajaran yang tidak hanya mengintegrasikan teknologi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan sikap kritis terhadap informasi.

Dengan pendekatan holistik ini, pendidikan agama Islam dapat menjadi fondasi dalam membentuk generasi digital yang tidak hanya melek teknologi tetapi juga memiliki kecerdasan spiritual dan sosial yang tinggi.

Pembahasan

Periode Sesi Kebijakan Kurikulum PAI Masa Awal Kemerdekaan (1945-1950)

Pasca-kemerdekaan Indonesia, pendidikan Islam menghadapi tantangan signifikan dalam integrasi dengan sistem pendidikan nasional (Hidayat, Nisa, Zaini, Safitri, & Astini, 2024). Pada periode ini, pendidikan Islam masih didominasi oleh pesantren dan madrasah yang berfokus pada pengajaran kitab-kitab klasik (kitab kuning) dengan sistem yang belum seragam (Olivia, Zulmuqim, & Masyhudi, 2024). Tantangan utama adalah memperjuangkan pengakuan pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional yang sebelumnya kurang mendapat perhatian selama masa kolonial (Syakur & Yusuf, 2020). Pembentukan Kementerian Agama pada tahun 1946 menjadi tonggak penting, dengan salah satu tugasnya mengelola pendidikan Islam dan mengusulkan agar pendidikan agama menjadi mata pelajaran wajib di sekolah umum (Mukhibat, Istiqomah, & Hidayah, 2023).

Rencana Pembelajaran 1947 menjadi cikal bakal kurikulum nasional yang mulai memperkenalkan Pendidikan Agama Islam di sekolah-sekolah umum, meskipun masih bersifat pilihan dan terbatas (Gustiani, Ramli, & Saumia, 2024). Kendala utama yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat itu adalah keterbatasan pendanaan, fasilitas, dan tenaga pengajar karena minimnya bantuan finansial dari pemerintah, sehingga banyak lembaga pendidikan Islam berkembang secara mandiri.

Seiring perkembangan waktu, PAI mendapatkan pengakuan yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional. Tahun 1950 menjadi titik penting ketika pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa PAI diberikan di sekolah umum negeri mulai dari tingkat SD hingga SMA, meskipun masih dengan syarat adanya permintaan dari orang tua peserta didik. (Mulyana et al., 2023). Penguatan signifikan terjadi pada tahun 1951 ketika pemerintah mulai mengangkat guru-guru agama sebagai pegawai negeri, dan tahun 1958 dengan dikeluarkannya peraturan yang mewajibkan PAI di semua sekolah negeri (Putri & Maula, 2024). Kebijakan ini berdampak positif pada peningkatan pemahaman keagamaan peserta didik, pembentukan karakter dan moral, serta menjadi dasar bagi perkembangan kurikulum PAI selanjutnya.

Kementerian Agama memainkan peran strategis dalam pendidikan dengan merumuskan kebijakan terkait pendidikan agama, mengelola lembaga pendidikan Islam (madrasah, pesantren, dan PTKI), menjamin kualitas guru dan tenaga pendidikan agama, mengembangkan kurikulum PAI, meningkatkan sarana prasarana pendidikan Islam, dan menjaga moderasi beragama dalam pendidikan. Peran-peran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pendidikan agama menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Masa Orde Lama (1950-1966)

Dimasukkannya Pendidikan Agama Islam dalam sistem pendidikan nasional merupakan langkah strategis untuk membangun generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berakhlak dan berkarakter Islami (Al Ghani, Susanto, & Ikhwan, 2023). Sebelum kemerdekaan, pendidikan agama Islam belum mendapat tempat signifikan dalam sistem pendidikan formal, terutama di sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah kolonial. Namun setelah Indonesia merdeka, tuntutan dari umat Islam mendorong pemerintah untuk memasukkan PAI ke dalam kurikulum sekolah umum secara bertahap (Arifin, 2025).

Beberapa kebijakan penting yang mengatur dimasukkannya PAI dalam sistem pendidikan nasional adalah Rencana Pembelajaran 1947, UU No. 4 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah

Tahun 1958, UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989, dan UU No. 20 Tahun 2003. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah yang semakin kuat dalam menjadikan pendidikan agama sebagai komponen wajib dalam sistem pendidikan nasional. Tujuan dimasukkannya PAI dalam kurikulum sekolah umum adalah untuk membentuk karakter dan moral peserta didik, membekali mereka dengan pemahaman Islam yang moderat dan toleran, menanamkan nilai-nilai spiritual dan sosial, serta menyelaraskan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama.

Kurikulum 1954 dan 1964 merupakan dua tahapan penting dalam pengembangan PAI di Indonesia (Anitasari & Cahyono, 2023). Kurikulum 1954 memperkuat peran PAI dengan mewajibkan pendidikan agama di sekolah umum dari tingkat SD hingga SMA, memstandarisasi materi PAI, meningkatkan peran guru agama, dan membuat pembelajaran PAI lebih sistematis. Dampaknya adalah PAI semakin diakui dalam sistem pendidikan nasional dan pemerintah lebih aktif dalam pengelolaan tenaga pengajar PAI.

Kurikulum 1964 diperkenalkan dengan konsep Pancawardhana yang menekankan pengembangan lima aspek utama dalam pendidikan, termasuk daya moral (spiritual dan agama) (Raharjo, 2020). Pendidikan Agama Islam tetap menjadi mata pelajaran wajib dengan penguatan aspek moral dan kepribadian berbasis agama (Putri & Maula, 2024). Fokus pembelajaran tidak hanya pada hafalan tetapi juga pada praktik dan penerapan nilai-nilai Islam, sementara pesantren dan madrasah mulai mendapat perhatian lebih dalam regulasi dan kebijakan pendidikan nasional.

Penguatan nilai-nilai agama dalam pendidikan menjadi aspek fundamental karena urgensinya dalam membentuk karakter dan akhlak mulia, mencegah krisis moral dan sosial, menanamkan kesadaran spiritual dan ketakwaan, serta menjaga harmoni sosial. Strategi penguatan dilakukan melalui integrasi pendidikan agama dalam kurikulum, pembinaan karakter berbasis agama, optimalisasi peran guru dan tenaga pendidik, serta penggunaan teknologi dalam pendidikan agama. Meskipun penting, penguatan nilai-nilai agama juga menghadapi tantangan seperti minimnya perhatian terhadap pendidikan karakter, pengaruh globalisasi, kurangnya tenaga pendidik agama berkualitas, dan perbedaan pemahaman dalam penerapan nilai-nilai agama.

Masa Orde Baru (1966-1980)

Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan mengalami perubahan signifikan seiring dengan perubahan arah politik nasional yang menekankan stabilitas dan pembangunan ekonomi (Ervia, Harahap, & Chastanti, 2024). Periode ini ditandai dengan sentralisasi kebijakan pendidikan yang kuat, termasuk dalam pengelolaan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI). Kurikulum 1968 muncul sebagai respons terhadap situasi politik pasca peristiwa G30S, dengan tujuan utama memperkuat ideologi Pancasila dan menghilangkan pengaruh komunisme dalam pendidikan. Dalam kurikulum ini, PAI tetap menjadi mata pelajaran wajib dengan penekanan pada pembentukan moral Pancasila yang dilandasi nilai-nilai keagamaan.

Karakteristik Kurikulum 1968 untuk PAI menunjukkan penekanan pada aspek kognitif dengan fokus pada pengetahuan agama, materi PAI distandarisasi secara nasional, pengajaran PAI lebih bersifat doktriner dan tekstual, serta alokasi waktu PAI relatif terbatas yaitu 2 jam pelajaran per minggu (Alya, 2023). Meskipun PAI mendapat tempat dalam kurikulum, pendekatan pembelajarannya cenderung bersifat normatif dan kurang menekankan aspek kritis-analitis. Hal ini mencerminkan semangat zaman yang mementingkan stabilitas dan keseragaman dalam pendidikan nasional.

Kurikulum 1975 membawa perubahan metodologis penting dengan menerapkan pendekatan berorientasi tujuan (goal-oriented approach) (Ayudia et al., 2023). Kurikulum ini dikenal dengan "Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional" (PPSI) yang menekankan perencanaan pembelajaran secara sistematis. Dalam konteks PAI, Kurikulum 1975

memperkenalkan pemisahan materi PAI menjadi tiga aspek utama: Aqidah, Ibadah/Syariah, dan Akhlak, pembelajaran PAI yang lebih terstruktur dengan tujuan instruksional yang jelas, pengenalan metode evaluasi yang lebih terukur, serta peningkatan kompetensi guru PAI melalui berbagai pelatihan.

Kebijakan Kurikulum 1975 juga memperkuat posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, terutama setelah terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tahun 1975 yang menyebutkan bahwa ijazah madrasah setara dengan sekolah umum. Konsekuensinya, madrasah harus mengalokasikan 70% kurikulumnya untuk mata pelajaran umum dan 30% untuk mata pelajaran agama. Perubahan ini menandai upaya integrasi madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional, sekaligus tantangan bagi lembaga pendidikan Islam untuk menyeimbangkan penguasaan ilmu agama dan ilmu umum.

Memasuki dekade 1980-an, kebijakan pendidikan semakin menekankan aspek kualitas. Kurikulum 1984 memperkenalkan pendekatan keterampilan proses (*process skill approach*) yang berusaha mengembangkan kemampuan siswa dalam mencari dan mengolah informasi. Perubahan signifikan dalam PAI pada Kurikulum 1984 meliputi penerapan metode CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) dalam pembelajaran PAI, pengembangan materi PAI yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari, penguatan aspek afektif dan psikomotorik, tidak hanya kognitif, serta peningkatan alokasi waktu PAI menjadi 3 jam pelajaran per minggu di beberapa jenjang (Harahap et al., 2024).

Era ini juga ditandai dengan terbitnya UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang semakin mengukuhkan posisi pendidikan agama dalam sistem pendidikan nasional. Pasal 39 ayat 2 UU tersebut menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Kebijakan ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan PAI di sekolah-sekolah dan membuka jalan bagi penguatan pendidikan Islam pada periode selanjutnya.

Kebijakan pendidikan pada masa Orde Baru tidak lepas dari agenda politik rezim yang berkuasa. Beberapa implikasi politik terhadap PAI mencakup depolitisasi Islam dimana PAI diarahkan pada aspek ritual dan individual, menjauhkan dari dimensi sosial-politik Islam. Selain itu, terdapat standardisasi dan kontrol dimana materi PAI distandarisasi secara ketat dan diawasi untuk menghindari "penyimpangan" serta akomodasi terbatas dimana kebijakan terhadap pendidikan Islam bersifat akomodatif terbatas, mengizinkan pengembangan kelembagaan namun tetap dalam kerangka kontrol pemerintah.

Meskipun menghadapi berbagai kendala politik, periode Orde Baru juga mencatat beberapa kemajuan dalam pengelolaan PAI, seperti peningkatan status madrasah, pengembangan perguruan tinggi Islam negeri, dan peningkatan kualifikasi guru PAI. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tetap mampu berkembang bahkan dalam situasi politik yang cenderung membatasi, berkat adaptasi dan negosiasi kultural yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan pendidikan Islam.

Masa Reformasi (1998-sekarang)

Era Reformasi membawa perubahan fundamental dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan (Pokhrel & KC, 2024). Demokratisasi dan desentralisasi menjadi dua kata kunci yang memengaruhi arah kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum PAI. Kurikulum 1994 yang masih berlaku di awal era Reformasi menerapkan pendekatan penguasaan materi (*content-based curriculum*) dengan ciri khas pembelajaran yang padat materi. Dalam konteks PAI, kurikulum ini cenderung overloaded dan kurang memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas siswa.

Merespons kritik dan tuntutan reformasi, pemerintah mengeluarkan Suplemen Kurikulum 1999 yang memberikan fleksibilitas lebih besar dan mengurangi beban materi. Untuk PAI, perubahan meliputi pengurangan materi hafalan, penekanan pada aspek pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai Islam, peningkatan relevansi materi dengan kehidupan sehari-hari, serta pengembangan pembelajaran yang lebih demokratis dan partisipatif. Perubahan ini mencerminkan semangat reformasi yang mendorong demokratisasi di berbagai bidang, termasuk pendidikan agama.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 menandai perubahan paradigma dari pendekatan berbasis materi menjadi pendekatan berbasis kompetensi (Rinjani, Mulyani, & Pangestika, 2024). Dalam konteks PAI, perubahan signifikan meliputi orientasi pada kompetensi dimana fokus pembelajaran PAI bergeser dari penguasaan materi ke pengembangan kompetensi keagamaan yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik (Auliya et al., 2025). Terjadi pula pembelajaran kontekstual melalui pendekatan *Contextual Teaching and Learning (CTL)* yang mengaitkan materi PAI dengan konteks kehidupan nyata, diversifikasi model pembelajaran melalui pengembangan berbagai metode pembelajaran yang lebih interaktif dan berbasis siswa, serta evaluasi komprehensif melalui sistem penilaian yang tidak hanya mengukur pengetahuan tetapi juga sikap dan pengamalan nilai-nilai Islam.

KBK merepresentasikan upaya pembaruan pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat (Aliyah, Sari, & Warlizasusi, 2024). Nilai-nilai demokratis yang menjadi semangat reformasi tercermin dalam pendekatan pembelajaran yang lebih partisipatif dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara utuh. Inovasi KBK juga mendorong integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, mengurangi dikotomi yang telah lama menjadi tantangan dalam pendidikan Islam di Indonesia.

KTSP 2006 dikembangkan sebagai penyempurnaan dari KBK dengan memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Dalam konteks PAI, KTSP membawa beberapa perubahan berupa diversifikasi kurikulum PAI dimana setiap sekolah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kurikulum PAI yang sesuai dengan karakteristik siswa dan lingkungan sosial-budaya setempat. Terjadi pula pengembangan silabus lokal dimana guru PAI dapat mengembangkan silabus yang kontekstual dengan kebutuhan daerah, penguatan pendidikan karakter dimana aspek akhlak dan pengamalan nilai-nilai Islam mendapat penekanan yang lebih kuat, serta pengembangan ekstrakurikuler keagamaan melalui perluasan pembelajaran PAI melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti Rohis, pesantren kilat, dan kegiatan sosial keagamaan.

KTSP memberikan peluang bagi berkembangnya inovasi dalam pembelajaran PAI, termasuk integrasi budaya lokal dengan nilai-nilai keislaman. Namun, implementasinya menghadapi tantangan terkait kapasitas sekolah dan guru dalam mengembangkan kurikulum secara mandiri. Perbedaan sumber daya dan kapasitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan juga menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran PAI di berbagai daerah.

Kurikulum 2013 (K-13) hadir dengan visi mengintegrasikan aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendekatan tematik-integratif (Rinjani et al., 2024). Untuk PAI, Kurikulum 2013 membawa perubahan signifikan dimulai dari perubahan nomenklatur dimana mata pelajaran PAI berubah menjadi "PAI dan Budi Pekerti" untuk menegaskan pentingnya aspek karakter. Terjadi pula penambahan alokasi waktu dimana PAI dan Budi Pekerti mendapat tambahan jam pelajaran menjadi 3-4 jam per minggu, pendekatan saintifik melalui penerapan pendekatan saintifik (mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, mengomunikasikan) dalam pembelajaran PAI, serta penilaian autentik melalui sistem penilaian yang komprehensif mencakup aspek sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Revisi K-13 pada tahun 2016 dan 2018 semakin memperkuat aspek pengembangan karakter dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dalam pembelajaran PAI. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang terintegrasi dalam pembelajaran menjadikan PAI sebagai salah

satu ujung tombak pembentukan karakter peserta didik. Perubahan ini menunjukkan respon kebijakan pendidikan terhadap tantangan degradasi moral dan etika di masyarakat, dengan menjadikan PAI sebagai wahana strategis dalam pembentukan karakter generasi masa depan.

Kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasikan tahun 2022 membawa paradigma baru yang menekankan fleksibilitas, personalisasi pembelajaran, dan *Project-Based Learning* (Rahmafitri, Deswita, & Trisoni, 2024). Untuk PAI, Kurikulum Merdeka membawa beberapa perubahan berupa pembelajaran berbasis proyek dimana PAI diintegrasikan dalam proyek-proyek pembelajaran yang kontekstual dan bermakna, personalisasi pembelajaran melalui pengembangan pembelajaran PAI yang lebih adaptif dengan kebutuhan dan perkembangan siswa, digitalisasi melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran PAI, termasuk pengembangan platform pembelajaran daring dan multimedia interaktif, serta penguatan nilai Pancasila melalui integrasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran PAI untuk memperkuat moderasi beragama dan nasionalisme.

Kurikulum Merdeka menawarkan ruang yang lebih luas bagi pengembangan inovasi dalam pembelajaran PAI. Konsep "merdeka belajar" mendorong guru PAI untuk lebih kreatif dalam mengembangkan pembelajaran yang tidak hanya memperkaya pengetahuan keagamaan siswa tetapi juga mengembangkan kompetensi global seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Pengurangan beban administratif guru juga diharapkan memberikan ruang lebih bagi guru PAI untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna.

Era digital memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan PAI. Tantangan yang dihadapi antara lain literasi digital dimana terdapat kesenjangan digital antara guru PAI di perkotaan dan pedesaan, konten negatif berupa maraknya konten radikalisme dan informasi menyesatkan tentang Islam di dunia maya, degradasi nilai karena pengaruh negatif media sosial terhadap nilai-nilai dan perilaku keagamaan siswa, serta kesiapan guru dalam beradaptasi dengan teknologi dan metode pembelajaran digital (Nata, Rosyada, & Rahiem, 2023).

Di sisi lain, era digital juga membuka peluang besar bagi pengembangan PAI, seperti inovasi pembelajaran melalui pengembangan aplikasi, platform, dan konten digital untuk memperkaya pembelajaran PAI, peningkatan aksesibilitas terhadap sumber belajar Islam yang berkualitas, pengembangan jaringan melalui kolaborasi antara guru PAI melalui komunitas daring, serta moderasi digital melalui pemanfaatan media digital untuk menyebarkan Islam yang moderat dan toleran (Rahmadani, 2024). Era digital juga memungkinkan pengembangan pembelajaran PAI yang lebih adaptif dan personalisasi, menjawab kebutuhan peserta didik yang beragam.

Periode Reformasi hingga era digital saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pengembangan kurikulum PAI. Di satu sisi, kebijakan kurikulum semakin terbuka dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Di sisi lain, PAI menghadapi tantangan untuk tetap relevan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai keislaman yang otentik. Ke depan, pengembangan kurikulum PAI perlu memperkuat peran dalam membentuk karakter dan moderasi beragama, mengintegrasikan teknologi digital secara bermakna, serta menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan era global dengan tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman yang kuat.

Kesimpulan

Penelitian tentang periodisasi kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia menunjukkan evolusi yang dinamis sejak masa kemerdekaan hingga era digital. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma pendidikan dari pendekatan normatif-doktriner menuju pendekatan yang lebih kontekstual, integratif, dan berorientasi pada

kompetensi, sambil tetap mempertahankan esensi nilai-nilai keislaman. Transformasi kurikulum PAI juga tidak terlepas dari dinamika sosial-politik yang mewarnai setiap periode, mulai dari upaya pengakuan PAI dalam sistem pendidikan nasional pada masa awal kemerdekaan hingga integrasi teknologi dan penguatan moderasi beragama pada era kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena pendekatan studi pustaka yang digunakan belum dapat mengungkap implementasi aktual kebijakan kurikulum di lapangan. Rentang waktu sumber literatur yang terbatas pada tahun 2021-2025 juga membatasi perspektif historis yang lebih komprehensif, sementara analisis faktor-faktor eksternal yang memengaruhi kebijakan kurikulum PAI belum digali secara mendalam. Penelitian ke depan perlu melibatkan studi empiris tentang implementasi kurikulum dan pengembangan model integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI yang kontekstual dengan budaya Indonesia.

Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini telah menyajikan pemetaan periodisasi yang sistematis yang membantu mengidentifikasi pola perubahan dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pemahaman integratif tentang hubungan antara kebijakan pendidikan, dinamika sosial-politik, dan perkembangan teknologi dalam membentuk arah pengembangan PAI menjadi penting untuk mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang di era digital. Kerangka konseptual yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk penelitian lanjutan yang lebih spesifik serta landasan dalam merumuskan kebijakan pendidikan agama yang adaptif dan responsif terhadap tuntutan zaman.

Referensi

- Al Ghani, Y. I., Susanto, H., & Ikhwan, A. (2023). Pendidikan Agama Islam: Problematika Dan Tantangan. *Katalog Buku STAI Muhammadiyah Tulungagung*, 1–102.
- Aliyah, A., Sari, D. P., & Warlizasusi, J. (2024). *Analisis Permasalahan Dan Kebutuhan Pelatihan Guru Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar (Studi Pada Guru PAI SDIT Annajiyah Lubuklinggau)*. Pascasarjana IAIN Curup.
- Alya, K. S. L. (2023). Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(4), 1678–1689.
- Anitasari, L., & Cahyono, A. (2023). Kurikulum Dan Pola Ilmu Pengetahuan Pada Masa Orde Lama Dan Orde Baru. *Social Science Academic*, 1(2), 93–98.
- Arifin, M. S. (2025). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA SEKOLAH SEBAGAI SUB SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 4(1), 1–9.
- Auliya, Z., Sari, I. D. P., Putri, L. E., Afando, I. E., Wismanto, W., & Ramashar, W. (2025). Muhammadiyah Dan Transformasi Pendidikan Di Era Modern. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 152–160.
- Ayudia, I., Bhoke, W., Oktari, R., Carmelita, M., Salem, V., Khairani, M., ... Imbar, M. (2023). Pengembangan Kurikulum. *PT. Mifandi Mandiri Digital*.
- Ervia, E., Harahap, R. D., & Chastanti, I. (2024). Analisis Perkembangan Kurikulum Biologi Dari Kurikulum 1984 Sampai Dengan Kurikulum Merdeka. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 13(1), 927–936.
- Gustiani, A., Ramli, S., & Saumia, Z. (2024). NIAM (NEDERLANDSCH INDISCHE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ) SCHOOL: EKSPLORASI MINYAK DAN PENDIDIKAN DASAR DI BAJUBANG. *Siginjai: Jurnal Sejarah*, 4(1).
- Harahap, Y., Kurrahman, O. T., & Rusmana, D. (2024). Analisis Historis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Di Indonesia. *Journal Of Creative Student Research*, 2(6), 169–181.

- Hidayat, R., Nisa, K., Zaini, M., Safitri, D., & Astini, B. I. (2024). Realita Pendidikan Islam Di Indonesia Pasca Kemerdekaan: Perkembangan, Tantangan, Dan Prospek Masa Depan. *Quranicedu: Journal Of Islamic Education*, 4(2), 188–204.
- Irawan, H. (2024). Memahami Organisasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam: Perspektif Dan Evaluasi Dalam Konteks Pendidikan Umum. *Peradaban Journal Of Interdisciplinary Educational Research*, 2(2), 42–54.
- Judrah, M., Arjum, A., Haeruddin, H., & Mustabsyirah, M. (2024). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Karakter Peserta Didik Upaya Penguatan Moral. *Journal Of Instructional And Development Researches*, 4(1), 25–37.
- Mukhibat, M., Istiqomah, A. N., & Hidayah, N. (2023). Pendidikan Moderasi Beragama Di Indonesia (Wacana Dan Kebijakan). *Southeast Asian Journal Of Islamic Education Management*, 4(1), 73–88.
- Nata, A., Rosyada, D., & Rahiem, M. D. H. (2023). *Kompetensi Literasi Digital Guru Pendidikan Agama Islam Di Era Revolusi Industri 4.0*.
- Olivia, O., Zulmuqim, Z., & Masyhudi, F. (2024). Sejarah Serta Dinamika Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia (Surau, Pesantren Dan Madrasah). *Pandawa*, 6(1), 54–69.
- Pokhrel, L., & KC, A. (2024). Mobile Banking Service Quality And Continuance Intention: Mediating Role Of Satisfaction: A Two-Stage Structural Equation Modeling-Artificial Neural Network Approach. *International Journal Of Bank Marketing*, 42(3), 389–413.
- Putri, Z. F., & Maula, N. (2024). Curriculum Transformation In Indonesia And Its Effect On Student Competencies:: Literature Study On 1947 Curriculum Until Merdeka Curriculum. *Jurnal Teknodik*, 77–93.
- Raharjo, R. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum Ppkn: Dari Rentjana Pelajaran 1947 Sampai Dengan Merdeka Belajar 2020. *Pkn Progresif: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Kewarganegaraan*, 15(1), 63–82.
- Rahmadani, S. (2024). Strategi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Era Digital: Tinjauan Literatur Kualitatif. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Rahmafitri, F., Deswita, E., & Trisoni, R. (2024). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pendidikan. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(1), 45–55.
- Rinjani, A. Q., Mulyani, M., & Pangestika, R. R. (2024). TELAAH KURIKULUM PENDIDIKAN: DINAMIKA PERUBAHAN PENERAPAN KURIKULUM DI INDONESIA. *Jurnal Panrita*, 5(2), 80–92.
- Saputro, M. A. W. S., Helta, A. R., Ambiya, B., Divando, A. F., & Syah, H. I. (2024). Mengeksplorasi Implementasi Nilai-Nilai Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Di Perguruan Tinggi Muhammadiyah. *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Pengembangan Dakwah, Pondok Al Islam Dan Kemuhammadiyah*, 109–117.
- Syakur, A., & Yusuf, M. (2020). Pendidikan Islam Pada Masa Penjajahan. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 1(1), 37–47.